



SKRIPSI

Judul:

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 MENGHADAPI ANCAMAN
ORGANISASI SEPARATISME
TERORISME PAPUA

Disusun oleh:

WHISNU AJI PRAWIRADHIKA SUGANDI
NIM. 205200184

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 MENGHADAPI ANCAMAN ORGANISASI
SEPARATISME DAN TERORISME PAPUA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun Oleh :
Whisnu Aji P.S
NIM. 205200184

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Pengesahan

Nama : WHISNU AJI PRAWIRADHIKA SUGANDI
NIM : 205200184
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 MENGHADAPI ANCAMAN ORGANISASI SEPARATISME DAN TERORISME PAPUA
Title : IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 34 OF 2004 FACING THE THREAT OF PAPUAN SEPARATISM AND TERRORISM ORGANIZATIONS

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

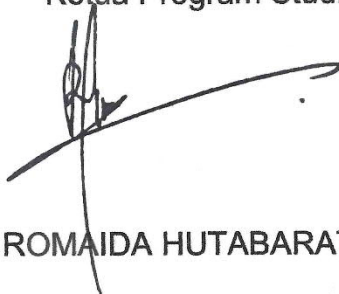
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : WHISNU AJI PRAWIRADHIKA SUGANDI
NIM : 205200184
Program Studi : HUKUM
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 MENGHADAPI ANCAMAN ORGANISASI
SEPARATISME DAN TERORISME PAPUA

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 11-Desember-2024

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

Hingga saat ini konflik di Papua menghadirkan kompleksitas masalah keamanan yang mencakup keragaman etnis, budaya, isu historis, geopolitik, dan ketidakadilan sosial yang mendalam. Wilayah ini, meskipun kaya akan sumber daya alam seperti emas dan minyak, menghadapi tantangan berupa ketidakpuasan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemerintah pusat dan ancaman separatisme yang terus berlangsung. Dalam upaya menangani ancaman tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk menangani ancaman terhadap kedaulatan negara, termasuk separatisme di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU TNI di Papua, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi efektivitas pendekatan yang digunakan. Metode penelitian yang diimplementasikan pada penelitian ialah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan UU TNI di Papua telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak era Reformasi. Pendekatan militeristik, seperti Operasi Nemangkawi, dinilai efektif dalam menekan aktivitas separatis, tetapi sering kali memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, terutama karena adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan. Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendekatan pemerintah mulai beralih pada pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Trans-Papua, untuk mengurangi isolasi dan ketegangan sosial. Namun, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih holistik, menggabungkan kekuatan militer dengan dialog dan diplomasi yang inklusif. Pendekatan ini diperlukan untuk menciptakan stabilitas yang berkelanjutan, mengatasi ketidakadilan historis, dan memperbaiki hubungan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat.

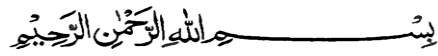
Kata Kunci: Papua, TNI, separatisme, hak asasi manusia, pembangunan

ABSTRACT

The conflict in Papua continues to present complex security challenges encompassing ethnic and cultural diversity, historical and geopolitical issues, and profound social injustices. This region, although rich in natural resources such as gold and oil, faces ongoing challenges, including local dissatisfaction with central government policies and the persistent threat of separatism. To address these threats, the Indonesian government enacted Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), granting TNI the authority to handle threats to national sovereignty, including separatism in Papua. This study aims to analyze the implementation of the TNI Law in Papua, identify the challenges faced, and evaluate the effectiveness of the approaches employed. The research utilizes a normative legal method. The findings reveal that the implementation of the TNI Law in Papua has undergone significant developments, particularly since the Reform Era. Military approaches, such as Operation Nemangkawi, have proven effective in suppressing separatist activities but often exacerbate tensions between the central government and the Papuan community, particularly due to reported human rights violations. Under President Joko Widodo's administration, the government's focus shifted toward infrastructure development, such as the Trans-Papua Highway, aimed at reducing isolation and social tensions. However, the study highlights the necessity of a more holistic approach that integrates military strength with inclusive dialogue and diplomacy. Such an approach is essential for achieving sustainable stability, addressing historical injustices, and improving relations between the Papuan people and the central government.

Keywords: *Papua, TNI, separatism, human rights, development*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 MENGHADAPI ANCAMAN ORGANISASI SEPARATISME DAN TERORISME PAPUA ”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Tarumanagara Jakarta. Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro , S.H., M.H., M.KN., M.M., Selaku Dekan Sekaligus Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H. Selaku Ketua Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Semester Genap 2024/2025 Sekaligus Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Christine S.T.Kansil S.H., M.Hum. Selaku kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Rasji, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Sekaligus Wakil Rektor Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Mia Hadiati S.H., M.Hum., Selaku Anggota Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Semester Genap 2024/2025.
6. Bapak Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., Selaku Anggota Dosen Penguji Sidang Skripsi
7. Bapak Dr. Hery Firmansyah S.H., M.Hum., MPA Selaku Ketua Dosen Pengguji Sidang Skripsi
8. Staff dan Kepala Hukum Komando Daerah Militer Jayakarta, Yang telah memberikan masukan dan arahan dengan sangat baik.
9. Keluarga Saya Dan Teman Teman Seperjuangan Di Fakultas Hukum Tarumanagara yang memberi support dan semangat selama masa studi berlangsung.
10. Semua pihak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Penelitian ini Bermanfaat bagi pengembangan ilmu dalam bidang hukum .

Jakarta, 6 Januari 2025

(Whisnu Aji P.S)

Pernyataan

Nama : WHISNU AJI PRAWIRADHIKA SUGANDI
NIM : 205200184
Program Studi : HUKUM
Judul : IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 MENGHADAPI ANCAMAN ORGANISASI
SEPARATISME DAN TERORISME PAPUA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11-Desember-2024

Yang menyatakan



WHISNU AJI PRAWIRADHIKA SUGANDI
NIM. 205200184

DAFTAR ISI

Halama Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Orisinalitas.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Singkatan.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	0
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual Dan Teoritis.....	12
1. Kerangka Konseptual	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Spesifikasi Penelitian.....	15
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Pendekatan Penelitian.....	16
5. Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KERANGKA TEORETIS	19
A. Kepatuhan Hukum	19
B. Keamanan Nasional	27
C. Penegakan Hukum	32
D. Dinamika Nasional.....	37
E. Kedaulatan Negara	38

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	40
A. Kelompok Separatis Dan Terorisme	40
B. Kelompok Organisasi Papua Merdeka Serta Konflik di Papua	55
C. Dasar Hukum Gerakan Separatis Dan Tindakan Terorisme Serta Dampaknya Dalam Menanggulangi Konflik di Papua	69
BAB IV PEMBAHASAN.....	78
A. Implementasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dalam Menangani Ancaman Organisasi Separatisme Papua	78
B. Kendala Implementasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI Dalam Menangani Ancaman Organisasi Separatisme Papua	85
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	96
Lampiran.....	103

DAFTAR SINGKATAN

OPM	: Operasi Papua Merdeka
KKB	: Kelompok Kriminal Bersenjata
KST	: Kelompok Separatis Teroris
TPNPB	: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
DMP	: Dewan Musyawarah Papua
PKK	: Partai Pekerja Kurdistan
PBB	: Perserikatan Bangsa - Bangsa
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
KSB	: Kelompok Separatis Bersenjata
KODAP	: Komando Daerah Pertahanan
UU	: Undang - Undang
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
HAM	: Hak Asasi Manusia
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Rekap Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turnitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : Letter Of Acceptance (LOA) Sinta 4
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal